



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**2
0
2
0**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2020**



**BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI NTB
TAHUN 2021**

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang, berupa koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat yang berkedudukan di Jakarta.

Badan penghubung yang berada di Jakarta memiliki peran yang sangat strategis untuk daerah yaitu pelaksanaan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Pemerintah non Departemen dan Swasta di Jakarta. Sebagai pemersatu dan pengkoordinasi dan pembinaan masyarakat daerah yang berada di Jakarta. Serta hal yang tidak kalah pentingnya adalah Pelaksanaan kegiatan promosi daerah yang meliputi ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, Pengelolaan Anjungan Daerah NTB di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Adapun capaian dan realisasi strategis badan penghubung Daerah Pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Sasaran Strategis, Indikator Target dan Realisasi Anggaran.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Minat Masyarakat Nusantara atas Potensi pariwisata, seni dan kebudayaan daerah NTB	1. Jumlah kunjungan wisatawan pada anjungan daerah NTB di Jakarta.	17. 500 orang	16,651 orang
		2. Jumlah Penyelenggaraan event seni dan budaya pada anjungan NTB di TMII.	3 Kegiatan	3 Kegiatan
		3. Jumlah layanan fasilitasi dan koordinasi tugas kedinasan Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah Provinsi NTB di Jakarta dan sekitarnya	175 O/K	75 O/K

Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB juga dibeban kan dengan adanya Pendapatan asli daerah yang bersumber dari penerimaan retribusi penyewaan kamar

mess yang ditargetkan sebesar Rp. 1.800.000.000,- di tahun 2020 dan terealisasi sebesar Rp. 241.630.000,- (13,41 persen) dari target yang telah ditetapkan.

Adapun permasalahan yang menyebabkan rendahnya realisasi pendapatan kontribusi pada Badan Penghubung daerah adalah karena adanya wabah covid 19 yang menyebabkan aktifitas terganggu sehingga tidak adanya aktifitas penginapan di Mess NTB, begitu juga halnya dengan angka kunjungan pada anjungan taman mini indonesia indah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Peraturan daerah provinsi NTB tugas utama Badan Penghubung Daerah adalah memfasilitasi kedinasan Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Namun didalam RPJMD Provinsi NTB 2013-2023 Badan Penghubung berfungsi sebagai badan promosi daerah untuk meberikan informasi potensi pariwisata, seni dan kebudayaan daerah NTB, yaitu menunjang tugas Dinas Pariwisata dalam meningkatkan minat masyarakat Nusantara untuk berkunjung ke NTB.

Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang, berupa koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat yang berkedudukan di Jakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Penghubung Daerah bertanggung jawab kepada Gubernur selaku Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan secara administratif dikoordininasikan oleh Asisten Tata Praja dan Aparatur.

Akuntabilitas kinerja Badan Penghubung Daerah digunakan untuk menilai kemampuan pelaksanaan kinerja yang diwujudkan dalam prestasi kerja dan diukur berdasarkan tolak ukur keluaran hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Serta pencapaian misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan penetapan Kinerja serta Rencana strategis yang telah disusun pada awal pemerintahan terpilih.

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Penghubung Daerah menyadari betul akan pentingnya laporan kinerja dimaksud sehingga kesadaran tersebut

mendorong untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2020.

B. Gambaran Umum

a. Tugas Pokok

Merujuk kepada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Penghubung Daerah adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

b. Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Badan Penghubung Daerah mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Pemerintah non Departemen dan Swasta di Jakarta.
2. Pengkoordinasian dan pembinaan masyarakat daerah di Jakarta.
3. Pelaksanaan kegiatan promosi daerah yang meliputi ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata.
4. Pengelolaan Anjungan Daerah NTB di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur NTB sesuai dengan tugas dan fungsinya.

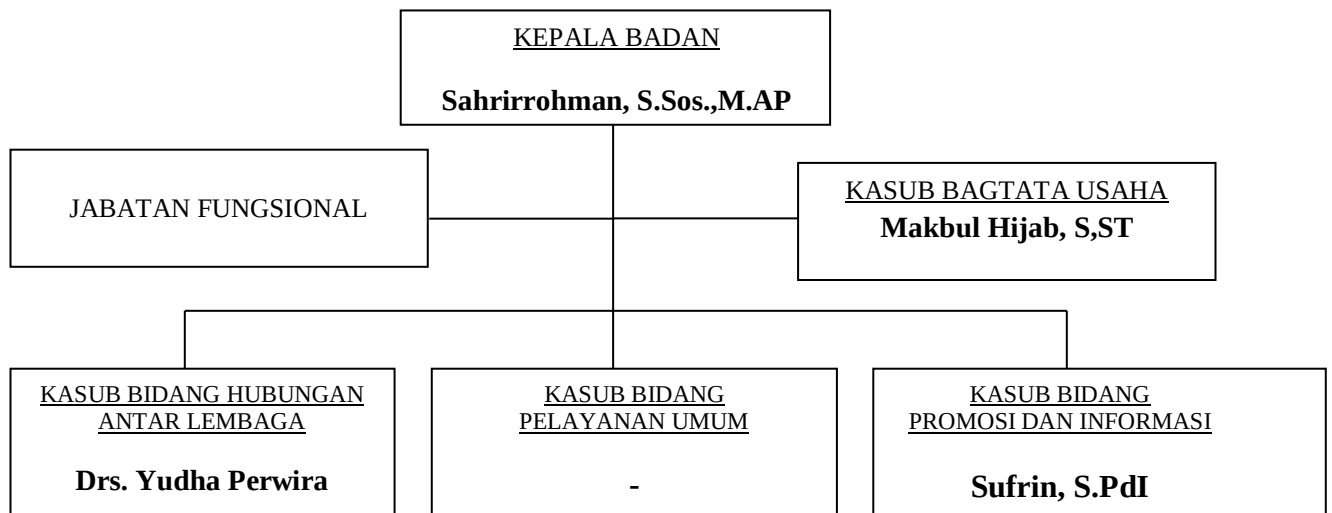
Adapun tugas masing-masing Sub Bagian dan Sub Bidang yang berada di Badan Penghubung Daerah, dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, pengelolaan asset/barang daerah, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, keuangan serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
2. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja dan tugas-tugas koordinasi antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan lembaga-lembaga negara, perwakilan-perwakilan negara sahabat, lembaga-lembaga lainnya serta pembinaan peran serta masyarakat NTB di Jakarta.
3. Sub Bidang Promosi Dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan promosi dan informasi, pengolahan data, informasi dan pengelolaan Anjungan Daerah NTB di TMII.
4. Sub Bidang Pelayanan Umum mempunyai tugas keprotokolan, pelayanan dibidang akomodasi dan transportasi bagi pejabat daerah NTB yang melaksanakan tugas kedinasan di Jakarta dan sekitarnya serta mengelola Wisma NTB.

c. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan Program dan kegiatan yang telah direncanakan melalui Renstra 2013-2023, Badan Penghubung Daerah didukung oleh perangkat organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini Badan Penghubung Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dibantu Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bidang Hubungan Antar lembaga, Sub Bidang Pelayanan Umum dan Sub Bidang Promosi dan Informasi, adapun Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB
Tahun 2020



d. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya Manusia masih menjadi satu faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program kegiatan dalam mewujudkan visi NTB GEMILANG dan 6 (enam) misi yang dituangkan dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi NTB tahun 2019 – 2023. Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Badan Penghubung Daerah terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai tidak Tetap (PTT).

Jumlah pegawai dilingkungan Badan Penghubung Daerah berdasarkan data jumlah pegawai pada akhir Tahun 2020 adalah sebanyak 54 orang, yang terdiri dari 38 ASN dan 16 PTT yang menurut status dan jenjang pendidikannya dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1.Berdasarkan Golongan ASN

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan IV	1
2	Golongan III	21
3	Golongan II	14
4	Golongan I	1

Tabel 1.2.ASN Badan Penghubung Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Magister	3
2	Sarjana	18
3	D1 – D4	1
4	SLTA/SMK	15
5	SLTP	1

Jumlah dan kualifikasi pegawai tersebut cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Daerah, namun untuk kualifikasi pendidikan tertentu seperti tenaga yang memahami perencanaan penganggaran, akuntansi Keuangan dan Kepariwisata masih belum cukup memadai. Untuk itu perlu adanya dukungan dan perhatian dalam meningkatkan sumber daya manusia yang ada sehingga apa yang telah tertuang dalam rencana kerja dapat tercapai.

e. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah didukung dengan moda transportasi berupa kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 18 unit dan roda 2 (dua) sebanyak 13 unit. Terdapat 1 ruang rapat/pertemuan dan 36 kamar yang terdiri dari kamar hunian sebagai penghasil PAD sebanyak 30 Kamar, 2 kamar sebagai sarana administrasi perkantoran dan 4 (empat) Kamar sebagai Pelayanan kepada Pimpinan daerah yang melakukan tugas dinas di Jakarta.

Untuk menjalankan kegiatan pelayanan, penyebaran informasi dan promosi daerah sarana dan prasarana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah. Untuk fungsi promosi dan informasi badan penghubung mengelola anjungan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang dapat dimanfaatkan sebagai media promosi budaya pariwisata NTB.

C. Aspek strategis dan permasalahan yang dihadapi

Keberadaan Badan penghubung Di Jakarta inilah yang menjadikannya Organisasi Perangkat Daerah yang strategis, dimana sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sehingga informasi tentang pemerintahan pusat cepat didapat dan diteruskan ke Daerah. Aspek strategis Badan penghubung daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat dilihat pada table berikut.

Table 1.3.Aspek Strategis Badan Penghubung Daerah

No	Indikator	Aspek Strategis	Keterangan
1	Sarana dan Prasarana	Pelayanan pejabat daerah yang bertugas di Jakarta dan pelaksanaan Tupoksi lainnya.	Kendaraan dinas operasional, peralatan dan perlengkapan Badan, dan peralatan rumah tangga yang cukup memadai
2	Promosi dan Publikasi	Melakukan promosi dan Publikasi kebudayaan dan pariwisata NTB di pusat ibu kota.	Bekerjasama dengan pengelola Taman Mini Indonesia Indah dan berbagai media cetak dan elektronik.
3	Pelaksanaan tugas pemerintahan	Lokasi kementerian/ lembaga yang berpusat di Jakarta memudahkan dalam koordinasi pelaksanaan tugas	Percepatan dalam proses administrasi urusan pemerintahan
4	Sosial Budaya	Komunikasi yang intens dengan Paguyuban Perantau masyarakat NTB yang ada di Jakarta	Selalu ikut serta secara aktif dalam berbagai kegiatan sosial budaya serta keagamaan dengan masyarakat NTB di Jakarta

Gambaran Badan Penghubung Daerah Pemerintah Provinsi NTB berdasarkan analisa SWOT yakni *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman/ tantangan) adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*)

Kekuatan yang dimiliki Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB di Jakarta adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai

tujuannya. Kekuatan merupakan modal dasar yang mesti dipelihara dan ditingkatkan diantaranya adalah:

- a. Kewenangan sebagai “duta” Pemerintah Provinsi NTB di Jakarta untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Dukungan Sumber Daya yang memadai (sumber daya manusia, sarana dan prasarana berupa gedung dan bangunan dengan perlengkapan dan peralatan Badan yang cukup memadai;
- c. Besarnya potensi daerah yang dapat “dijual” dipromosikan kepada masyarakat serta investor baik dalam maupun luar negeri;
- d. Adanya Website Badan Penghubung yang merupakan jendela atau pusat informasi terpadu tentang potensi daerah Kabupaten/Kota di NTB serta media publikasi kegiatan pimpinan daerah.
- e. Adanya kerjasama dengan pihak media yang merupakan sarana promosi potensi serta media publikasi yang dapat diakses dari mana saja di seluruh dunia.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Kelemahan adalah situasi kurang mampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat/gagal mencapai sasarannya. Kelemahan yang bisa menjadi penghambat untuk mencapai tujuannya antara lain:

- a. Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi yang masih belum tepat;
- b. Kurang terjalin kerjasama yang optimal dengan pemerintah daerah (Kab/Kota) yang menyebabkan susahny mendapatkan data atau bahan-bahan promosi yang memadai tentang industri, kerajinan, kesenian dan sebagainya dari daerah secara tepat dan akurat sehingga

mengganggu kualitas pelayanan informasi pada pihak yang membutuhkan.

- c. Lokasi yang jauh dengan Pemerintah Provinsi menjadikan keterlambatan informasi daerah yang perlu ditindak lanjuti segera.

3. Peluang (*Opportunities*)

Adanya perubahan pola pikir masyarakat dan sistem pemerintahan memberikan peluang atau kesempatan bagi Badan Penghubung Daerah di Jakarta untuk mengembangkan segala upaya untuk mengenalkan NTB sebagai daerah pariwisata yang memiliki potensi serta kemajuan daerah. Peluang atau kesempatan tersebut adalah:

- a. Banyaknya event promosi di Jakarta untuk pengenalan potensi daerah;
- b. Pemanfaatan teknologi informasi (IPTEK) dalam pelaksanaan tupoksi;
- c. Sumber Daya Masyarakat NTB yang ada di Jakarta cukup besar.

4. Ancaman/Tantangan (*Threats*)

Selain peluang atau kesempatan yang ada, terdapat pula ancaman yang dapat menyebabkan adanya kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan. Adapun ancaman yang dihadapi adalah:

- a. Letak wisma NTB yang kurang strategis, jauh dari lokasi ASN yang ditugaskan.
- b. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja dan pelayanan Pemerintah Daerah
- c. Dinamika sosial politik.

D. Ruang Lingkup

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penghubung Daerah meliputi realisasi anggaran tahun 2020, penyediaan sarana prasarana yang tersedia, Sumberdaya Manusia yang tersedia dan realisasi kegiatan untuk mencapai visi misi NTB Gemilang.

E. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB ini disusun berdasarkan beberapa peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 tahun 2016 Tentang Petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Peraturan anggaran perubahan 2019
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.

F. Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB Tahun 2020 terdiri dari:

Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada sub bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Rencana Strategis PD;
2. Indikator Kinerja UtamaPD;
3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020;
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020;
5. Pengukuran dan pencapaian kinerja PD Tahun 2020;
6. Foto penghargaan yang diterima PD atas nama Pemerintah Provinsi NTB baik Nasional/Internasional Tahun 2020;
Laporan pendukung LAKIP Tahun 2020;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB tahun 2019 – 2023 ditetapkan melalui Perda nomor 1 tahun 2019. RPJMD tahun 2019 -2023 merupakan tonggak awal periode kepemimpinan Zulkieflimansyah dan Hj. Siti Rohmi yang akan dijadikan dokumen perencanaan selama lima tahun kedepan yang mengusung visi “Membangun Nusa Tenggara Barat Yang GEMILANG” makna gemilang yang merupakan kata kunci dari misi tersebut adalah Provinsi NTB memiliki keyakinan untuk berperan besar di kancah Nasional dan International dengan percepatan dan lompatan pembangunan serta iktir mewujudkan NTB yang rapidan mampu bersaing, tangguh, dan tangguh. Dalam mewujudkan visi NTB GEMILANG ditetapkan enam misi pembangunan NTB yaitu :

- Misi I : NTB TANGGUH DAN MANTAP Melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah.
- Misi 2 : NTB BERSIH DAN MELAYANI Melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, nerkinerja tinggim bersih dari KKN dan berdedikasi.
- Misi 3 : NTB SEHAT DAN CERDAS Melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah.
- Misi 4 : NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.
- Misi 5 : NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi.
- Misi 6 : NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan

A.1. VISI DAN MISI

Visi merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu pemerintahan maupun organisasi sehingga visi itu penting untuk dituangkan dalam setiap perencanaan. Misi merupakan penjabaran dari visi atau suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi atau instansi pemerintah dalam rangka mencapai visi yang telah ditentukan. Dengan demikian diharapkan seluruh pegawai mengetahui arah kebijakan instansi dan mengetahui alasan keberadaan serta peranannya dalam mewujudkan visi tersebut.

Dengan mempertimbangkan dan menyelaraskan Visi Nusa Tenggara Barat GEMILANG dan dilatar belakangi 3 (tiga) peran dan fungsi utama Badan Penghubung Daerah di Jakarta, yakni sebagai ;

1. Penghubung Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Jakarta
2. Pengelola Anjungan Daerah NTB di Taman Mini Indonesia Indah dan;
3. Pengelola Mess Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Jakarta”

Misi atau pilihan cara yang dikembangkan oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendukung terwujudnya visi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya aparatur.
Ditujukan untuk mewujudkan peningkatan layanan administrasi kantor serta pengembangan aparatur yang ahli dibidangnya melalui peningkatan emosional dan spiritualnya, serta kemampuan intelektual dan keterampilan, serta kesehatan dan etika moral aparatur secara optimal.
2. Meningkatkan dan mengembangkan daya saing Mess.
Ditujukan bagi peningkatan kemampuan daya saing asset daerah yakni Mess/Wisma NTB di Jakarta dan peningkatan layanan kepada aparatur sipil negara daerah yang bertugas dinas di Jakarta, melalui peningkatan kualitas layanan kamar Mess, kualitas SDM beserta sarana dan prasarana pendukung.
3. Meningkatkan layanan promosi dan penyebaran informasi potensi daerah.

Ditujukan kepada upaya-upaya peningkatan dalam rangka memberikan pelayanan informasi daerah kepada masyarakat luas di Jakarta, dan mempromosikan potensi dan peluang investasi daerah, dengan sasaran peningkatan arus kunjungan wisatawan dan investasi ke daerah.

4. Meningkatkan layanan fasilitasi dan koordinasi antar lembaga kepada pejabat daerah dan pejabat pusat.

Ditujukan dalam rangka memberikan pelayanan dan fasilitasi hubungan antar lembaga dengan baik, khususnya antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Pusat di Jakarta dan sebaliknya, serta lembaga-lembaga negara, serta semua pihak yang berkompeten, melalui koordinasi dan sinkronisasi serta silaturahmi antar pihak-pihak yang terkait dengan pelayanan pejabat.

A.2. TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Badan Penghubung Daerah selama kurun waktu lima tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.

Tujuan Badan Penghubung Daerah Nusa Tenggara Barat, adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelayanan administrasi yang tertib dan profesional.
2. Terwujudnya pelayanan mess yang baik dan memuaskan.
3. Terwujudnya penyebaran informasi potensi daerah NTB di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
4. Terwujudnya hubungan kerja antar lembaga yang baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya.

Tabel 2.2.
Misi dan Tujuan Badan Penghubung Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat

No.	Misi	Tujuan
1.	Mewujudkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya aparatur	Meningkatnya pelayanan administrasi yang tertib dan profesional.
2.	Mewujudkan dan mengembangkan daya saing Mess	Meningkatnya pelayanan mess yang baik dan memuaskan.
3.	Mewujudkan layanan promosi dan penyebaran informasi potensi daerah.	Meningkatnya penyebaran informasi potensi daerah NTB di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
4.	Mewujudkan layanan fasilitasi dan koordinasi antar lembaga kepada pejabat daerah dan pejabat pusat.	Meningkatnya hubungan kerja antar lembaga yang baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya.

Adapun sasaran yang ingin dicapai pada periode tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya layanan administrasi perkantoran dengan fasilitas penunjang kerja yang lengkap.
2. Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang profesional.
3. Tersedianya fasilitas dan pelayanan prima mess yang ramah, sigap dan berkualitas.
4. Tersebaranya informasi potensi wisata, seni dan kebudayaan daerah Nusa Tenggara Barat kepada masyarakat nusantara dan internasional di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
5. Terjalinnnya hubungan kerja dengan lembaga eksekutif, legislatif, organisasi masyarakat dan tokoh-tokoh nasional dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang tepat sasaran dan tepat guna.

Tabel 2.3.
Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi yang tertib dan profesional.	1. Terwujudnya layanan administrasi perkantoran dengan fasilitas penunjang kerja yang lengkap.
		2. Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang profesional.
2.	Meningkatnya pelayanan mess yang baik dan memuaskan.	Terwujudnya fasilitas dan pelayanan prima mess yang ramah, sigap dan berkualitas.
3.	Meningkatnya penyebaran informasi potensi daerah NTB di wilayah Jakarta dan sekitarnya.	Terwujudnya penyebaran informasi potensi wisata, seni dan kebudayaan daerah Nusa Tenggara Barat kepada masyarakat nusantara dan internasional di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
4.	Terwujudnya hubungan kerja antar lembaga yang baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya.	Terwujudnya hubungan kerja dengan lembaga eksekutif, legislatif, organisasi masyarakat dan tokoh-tokoh nasional dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang tepat sasaran dan tepat guna.

Kebijakan yang ditetapkan Badan Penghubung Daerah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut adalah “ Profesional dalam pelayanan prima dalam koordinasi serta promosi informasi kesenian daerah”.

Badan Penghubung Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Provinsi NTB yang berkedudukan di Jakarta dan berada dibawah serta bertanggung jawab pada gubernur, melalui Sekretaris Daerah Provinsi NTB. Sebagai unsur pendukung Gubernur Badan Penghubung Daerah harus mampu berperan aktif dalam memperkuat pencapaian visi, misi dan program pemerintah Provinsi NTB. Sesuai dengan Tupoksinya melaksanakan pelayanan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu

dibidang pelayanan dan Badan Penghubung Daerah di Jakarta, serta mengelola Anjungan TMII yang merupakan replika kekayaan budaya yang mencerminkan karakteristik dan keunikan tersendiri dari Kabupaten/Kota di NTB. Untuk mencapai tujuan tersebut melalui seksi-seksi yang ada telah melaksanakan program dalam setiap anggaran kinerjanya diantaranya :

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan kemampuan kognitif dan kemampuan spiritual yang seimbang.
2. Meningkatkan mutu pengadaan serta pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan dan operasional kantor yang berkualitas dan sesuai kebutuhan.
3. Meningkatkan kualitas layanan fasilitasi, koordinasi kerja dan protokoler kegiatan pejabat daerah dan pejabat pusat.
4. Meningkatkan kegiatan informasi dan promosi potensi wisata, seni dan budaya daerah NTB di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
5. Memenuhi kebutuhan jumlah kamar Mess siap pakai, kendaraan dinas yang baik serta pelayanan tamu yang berkualitas.
6. Pelestarian kesenian daerah.

B. Indikator Kinerja

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis organisasi salah satunya diukur dengan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja, hal ini dilakukan guna memperoleh informasi kinerja penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik serta mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB adalah sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran yang mengacu pada RPJMD provinsi NTB tahun 2019 – 2023 sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI PENGUKURAN, TIPE PENGHITUNGAN, SUMBER DATA)
1	2	3	4
1	Meningkatkan Minat Masyarakat Nusantara atas Potensi pariwisata, seni dan kebudayaan daerah NTB	- Jumlah kunjungan wisatawan pada anjungan daerah NTB di Jakarta.	- Formula Perhitungan : Jumlah kunjungan wisatawan dalam promosi potensi daerah di TMII anjungan Daerah NTB. - Tipe Perhitungan Target : Kumulatif - Sumber Data : Laporan Hasil kunjungan wisatawan - Alasan : Untuk meningkatkan investasi/ kunjungan ke daerah
		- Jumlah penyelenggaraan kegiatan dialog/seminar/aidiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat pimpinan/anggota organisasi dan masyarakat rantau Provinsi NTB	- Formula Perhitungan : Jumlah kegiatan dialog/seminar/aidiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat daerah/100% - Tipe Perhitungan Target : Kumulatif - Sumber Data : Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan - Alasan : Untuk meningkatkan kualitas Pelayanan
		- Jumlah layanan fasilitasi dan koordinasi tugas kedinasan Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah Provinsi NTB di Jakarta dan sekitarnya	- Formula Perhitungan : Jumlah pelaksanaan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Audensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, pimpinan/Anggota/100% - Tipe Perhitungan Target : Kumulatif - Sumber Data : Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan - Alasan : Untuk meningkatkan kualitas pelayanan

Perencanaan strategis merupakan instrumen awal dalam melakukan pengukuran kinerja pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu indikator pertanggungjawaban, dan dengan jangka waktu tertentu organisasi dituntut untuk senantiasa selalu beradaptasi dengan tuntutan perkembangan lokal dan global. Disisi lain perencanaan sebagai alat *managerial* dalam rangka memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga.

B.1. Perjanjian Kinerja

Pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur, dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola, ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Tujuan penetapan kinerja adalah mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab dari satuan daerah masing-masing. Adapun target kinerja yang ingin dicapai Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 sebagaimana table berikut :

Tabel 7. Perjanjian Kinerja (PK)
Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Minat Masyarakat Nusantara atas Potensi pariwisata, seni dan kebudayaan daerah NTB	1. Jumlah kunjungan wisatawan pada anjungan daerah NTB di Jakarta.	17. 500 orang
		2. Jumlah Penyelenggaraan event seni dan budaya pada anjungan NTB di TMII.	3 Kegiatan
		3. Jumlah layanan fasilitasi dan koordinasi tugas kedinasan Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah Provinsi NTB di Jakarta dan sekitarnya	175 O/K

Adanya target kunjungan di anjungan NTB taman mini indonesia indah dihajatkan sebagai media promosi memperkenalkan NTB di mata Nasional dan International sehingga semakin besar jumlah kunjungan wisatawan di anjungan NTB akan menambah besar pula pengenalan terhadap budaya yang ada di NTB. Target kunjungsn wisatawan pada anjungan daerah NTB di TMII sebesar 17.500 Orang hal ini mengalami perubahan dari dari target sebelumnya sebesar 37.000 orang. Perubahan target dilakukan mengingat adanya wabah global covid-19 yang banyak memberikan pembatasan gerak masyarakat pada umumnya.

Adapun target dalam event – event nasional merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Taman Mini Indonesia Indah dalam memperkenalkan budaya dan pariwisata yang ada di Indonesia sehingga pada kesempatan tersebut pihak TMII mengundang berbagai duta besar negara sahabat yang ada untuk melihat secara langsung promosi pariwisata seni dan budaya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Salah satu pilar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih adalah dengan adanya pelaporan akuntabilitas kinerja, pengelolaan keuangan pelaporan yang professional, transparan dan bertanggungjawab. Profesionalitas aparatur pengelolaan keuangan akan menjadi semangat kerja yang dinamis untuk menumbuhkan karya dan karsa dalam sector rill kehidupan masyarakat. Hal itulah yang menjadi keseimbangan antara perencanaan dan pencapaian, perumusan dan pencapaian. Sinkronisasi antara laporan akuntabilitas kinerja dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama, pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang lazimnya dapat diperoleh melalui 2 (dua) sumber, yaitu : (1). sumber internal, berasal dari system informasi yang diterapkan pada instansi, dan (2) sumber eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dalam rangka perbaikan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Untuk mengukur efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran, dilakukan pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcomes) yang dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Analisis pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Badan Penghubung daerah tahun 2020 dilakukan terhadap target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penghubung daerah Tahun

2019-2023 yang diturunkan pada Rencana Kerja Tahun 2020 dan Penetapan Kinerja Tahun 2020. Adapun capaian kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 sebagai mana table berikut :

Tabel 3.1.
Pencapaian Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		Realisasi	
			2020	2019	2020	2019
(1)	(2)	(3)	(4)		5	
1	Meningkatkan Minat Masyarakat Nusantara atas Potensi pariwisata, seni dan kebudayaan daerah NTB	1. Jumlah kunjungan wisatawan pada anjungan daerah NTB di Jakarta.	17. 500 orang	35. 000 orang	16.651 orang	34.091 orang
		2. Jumlah Penyelenggaraan event seni dan budaya pada anjungan NTB di TMII.	3 Kegiatan	8 Kegiatan	3 kegiatan	8 Kegiatan
		3. Jumlah layanan fasilitasi dan koordinasi tugas kedinasan Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah Provinsi NTB di Jakarta dan sekitarnya	200 O/K	175 O/K	75 O/K	200 O/K

Pada table diatas terlihat jumlah kunjungan wisatawan pada anjungan masih kurang dari yang ditargetkan hanya mampu terealisasi sebanyak 16.651 orang dari target 17.500 orang, jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan target 35.000 orang tercapai 34.091 orang hampir mencapai 99 persen. Rendahnya pencapaian pada tahun 2020 diakibatkan adanya wabah global yaitu virus corona-19 yang mengakibatkan segala aktifitas perekonomian dan lainnya terhenti. hal ini tentunya sangat berpengaruh pada jumlah kunjungan di semua anjungan yang ada di TMII. Tentunya hal tersebut akan menjadi prioritas pada pelaksanaan promosi dan event –event selanjutnya yang lebih pariatif dan inovasi guna mendorong minat wisatawan untuk masuk berkunjung ke Anjungan NTB selain faktor sarana dan prasarana yang ada. adapun event –

event yang dilaksanakan di anjungan NTB di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) baru dikatakan sukses sebagai ajang promosi di Jakarta.



Dialog dengan masyarakat NTB di Jakarta merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahunnya untuk menjaga talisilaturahmi sebagai suku bangsa yang baik dan merupakan warga perantau di Jakarta. Tidak hanya dengan tokoh-tokoh masyarakat NTB namun juga dengan kumpulan mahasiswa yang ada di Jakarta. Hal ini dilakukan untuk memupuk rasa kecintaan akan daerah kelahiran sehingga kedepan akan memajukan NTB baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Sama halnya dengan target angka kunjungan di TMII yang semula 37.000 orang dirubah menjadi 17.500, Target penyelenggaraan event promosi di TMII juga mengalami penurunan yang semula dari 8 event menjadi 3 event hal ini juga merupakan akibat adanya refocusing anggaran dan adanya pembatasan untuk melakukan kegiatan yang menciptakan keramaian. Dengan alasan tersebut maka kegiatan event promosi dapat dikurangi untuk memenuhi protokol kesehatan covid-19.

Sedangkan dalam pencapaian target Jumlah layanan fasilitasi dan koordinasi tugas kedinasan Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah Provinsi NTB di Jakarta tergantung jumlah kunjungan kunjungan dari Gubernur, wakil Gubernur, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah ke Jakarta.

Badan Penghubung Daerah bertugas untuk mengelola Wisma NTB sebagai salah satu sarana akomodasi bagi aparatur daerah yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di Jakarta, juga merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi sewa kamar, dari 36 kamar yang ada Pengelola wisma NTB memiliki target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.800.000.000,- di tahun 2020.

Tabel 3.3.Data Realisasi PAD Wisma NTB

No.	Tahun	Retribusi Sewa KamarWisma NTB	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	2016	1.500.000.000,-	1.097.639.197,-
2.	2017	1.500.000.000,-	912.800.000,-
3.	2018	1.500.000.000,-	723.155.000,-
4.	2019	1.500.000.000,-	1.347.300.000,-
5.	2020	1.522.000.000,-	241.630.000

Pencapaian realisasi pada tahun 2019 di Mess NTB Rp.1.347.300.000,- lebih besar dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu pencapaian realisasi sebesar Rp.241.630.000,- dengan target pendapatan sebesar Rp.1.522.000.000 (15,88 %) rinciannya dapat dilihat pada Table diatas. Tingginya pencapaian ditahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2020 diakibatkan adanya wabah global yang telah dijelaskan dia atas yaitu wabah virus corona-19. Untuk meningkatkan penerimaan retribusi sewa kamar wisma NTB telah banyak dilakukan inovasi yang ada pada Badan penghubung Daerah. Yaitu berupa Peningkatan Pelayanan kamar, Peningkatan kebersihan Wisma NTB, mengikuti secara ketat protokol kesehatan, yaitu menggunakan

masker, cuci tangan dan menjaga jarak. Namun kecilnya realisasi pendapatan tersebut dikarenakan wabah Covid-19 yang memberikan batasan dalam melakukan kunjungan ke Jakarta.

b. Realisasi Anggaran

Pada tataran sistem pengukuran kinerja, ukuran keberhasilan pencapaian sasaran lebih tinggi dari pada pencapaian program dan kegiatan, karena program merupakan serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.



Oleh karena itu, pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian target kinerja APBD digunakan pengukuran kinerja pencapaian sasaran, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian dengan target atau rencana yang telah ditetapkan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tingkat pencapaian kinerja sesuai Program dan Kegiatan Badan Penghubung Daerah pada tahun

2020, berikut disajikan tabel Pencapaian Kinerja Keuangan TA. 2020, sebagai berikut:

Tabel 3.4. Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan TA. 2020

No	Program/kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	Persentase	Ket
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.171.572.600	3.022.208.617	95,29	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Layanan surat menyurat yang tersedia	20.604.000	20.593.000	99,95	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan Internet yang tersedia (paket)	547.339.800	411.603.486	75,20	
3	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Kegiatan koordinasi dan konsultasi di dalam daerah (org/keg)	206.369.950	206.059.750	99,85	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tenaga administrasi keuangan.	119.712.600	119.712.600	100,00	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa penyedia kebersihan Bahan tersedia	607.742.500	602.537.950	99,14	
6	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor tersedia.	39.688.200	36.945.200	93,09	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan kegiatan penggandaan	8.792.800	8.672.800	98,64	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sarana instalasi listrik yang terpasang	10.377.750	9.575.250	92,27	
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	6.000.000	6.000.000	100,00	
10	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman yang disediakan	311.011.000	311.011.000	100,00	
11	Penyelarasan Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	616.842.253	616.723.093	99,98	
12	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tenaga administrasi dan teknis perkantoran tersedia	462.353.000	460.309.700	99,56	

No	Program/kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	Persentase	Ket
13	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tenaga Keamanan Kantor yang tersedia	214.738.747	212.464.788	98,94	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.183.223.003	1.066.385.372	90,13	
1	Pengadaan Peralatan Gedung	Peralatan gedung kantor yang dibeli	50.650.000	50.480.396	99,67	
2	Pembangunan gedung kantor	Terpenuhinya Gedung Perkantoran	28.677.500	28.677.500	100,00	
3	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya jumlah kendaraan dinas/operasional	160.000.000	133.750.000	83,59	
4	Pengadaan Gedung Kantor	Gedung kantor yang disewa	-	-	0,00	
5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor yang dipelihara	330.182.900	309.037.200	93,60	
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas operasional yang dipelihara	540.472.603	476.630.276	88,19	
7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	73.240.000	67.810.000	92,59	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	9.000.000	9.000.000	100,00	
1	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Sumber Daya aparatur yang terbina.	9.000.000	9.000.000	100,00	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD	143.202.000	109.700.000	76,61	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan perencanaan dan capaian kinerja OPD	40.000.000	38.900.000	97,25	
2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terselenggaranya kegiatan penyusunan dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	20.202.000	18.000.000	89,10	

No	Program/kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	Persentase	Ket
3	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersusunnya dokumen laporan akhir tahun	83.000.000	52.800.000	63,61	
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD	22.200.000	22.200.000	100,00	
1	Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah	Tersusunnya dokumen aset BMD	22.200.000	22.200.000	100,00	
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah	44.097.900	44.000.000	99,78	
1	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Terselenggara nya dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, mahasiswa & pemuda NTB yang ada di Jakarta dan sekitarnya	44.097.900	44.000.000	99,78	
	Program Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan pada Anjungan Daerah NTB di Jakarta	540.391.100	515.474.875	95,39	
1	Pelaksanaan Promosi dan Informasi Potensi Daerah	Terselenggara nya kegiatan penyebaran informasi dan promosi potensi daerah Nusa Tenggara Barat di wilayah Jakarta dan sekitarnya.	540.391.100	515.474.875	95,39	
2	Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Promosi dan Informasi Pariwisata Nusantara	Terevaluasinya efektivitas pelaksanaan promosi dan informasi pariwisata nusantara	-	-	0,00	
TOTAL			5.113.686.603	4.788.968.864	93,65	

Realisasi belanja Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB pada tahun 2020 sebesar Rp. 4.788.968.864, (93,65 persen). Hal ini terjadi akibat adanya

beberapa belanja yang direncanakan lebih seperti halnya belanja listrik, air dan telepon. Namun pada kegiatan prioritas masih menjadi focus sehingga efisiensi sulit dilakukan pada kegiatan pelayanan pada pimpinan.

PENUTUP

Laporan pertanggungjawaban merupakan salah satu alat ukur dalam pencapaian visi dan misi yang telah dilakukan selama periode satu tahun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB disusun sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance.

Permasalahan yang masih terlihat dalam pembangunan di Badan Penghubung daerah adalah angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan masih belum tercapai, hal ini terjadi karena tingkat hunian pada Mess NTB masih rendah. Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya Aparatur Sipil Negara provinsi NTB yang tidak menginap di Mess pada saat melakukan perjalanan dinas di Jakarta yang mengakibatkan rendahnya PAD yang ada.

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja tersebut kedepan permasalahan yang ada akan dijadikan isu strategis yang harus menjadi prioritas penanganan melalui kebijakan pimpinan sehingga para ASN yang melakukan perjalanan Dinas dapat memanfaatkan fasilitas MESS NTB sehingga PAD yang ditargetkan dapat tercapai. Sedangkan permasalahan dalam pelayanan masih dapat dikoordinasikan dilapangan sehingga pelayanan pimpinan dapat terpenuhi dan tidak ada konflik yang timbul didalamnya.

Demikian LAKIP Tahunan ini disusun, semoga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas serta dapat memenuhi tuntutan dan keinginan masyarakat dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di tahun selanjutnya

Jakarta, 31 Desember 2020

Sahrirrohman, S.Sos.,M.AP

NIP. 196912151990031011